

SEANDAINYA SAYA GUBERNUR DKI

Rizal Ramli [\[1\]](#)

Saya berandai-andai menjadi Gubernur DKI karena gregetan melihat kemacetan yang luar biasa dan banjir tidak terkendali di DKI. Sudah tentu saya sebelumnya mohon maaf kepada sahabat saya, Gubernur Fauzi Bowo, orang baik dengan tanggung jawab yang sangat kompleks. Saya terpaksa berandai-andai karena kelihatannya tidak ada solusi dan harapan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir. Bangsa yang tidak memiliki harapan adalah bangsa yang mandek, tidak memiliki kreatifitas dan akhirnya terperosok menjadi bangsa yang terus menerus bermasalah.

Saya sendiri bukan ahli tata kota, tetapi sulit membayangkan bahwa hanya dengan memindahkan Ibukota, masalah kemacetan dan kesemrawutan Jakarta akan berkurang. Sekitar 20% lalu lintas kendaraan dari dan ke Jakarta terkait dengan kegiatan pelabuhan Tanjung Priok. Adalah lebih bermanfaat untuk memindahkan kegiatan Pelabuhan utama Republik Indonesia ke lokasi di Propinsi Banten sehingga tekanan kemacetan lalu lintas di Jakarta berkurang. Realokasi kegiatan pelabuhan tersebut juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya bongkar muat barang.

Dengan total penduduk Jabotabek sebanyak 28 juta, kebutuhan terhadap transportasi publik yang memadai harus jadi prioritas utama. Bukan sesuatu hal yang terlalu sulit untuk melakukan restrukturisasi finansial dan penyelesaian proyek monorail secepat mungkin. Program pembangunan jaringan subway, diatas maupun dibawah tanah, tidak hanya ke pusat kota tetapi lingkaran-lingkaran luar kota, harus dipercepat dan di perluas secara lebih agresif. Bayangkan jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan, langsung maupun tidak langsung.

Untuk memacu birokrasi, Bang Ali Sadikin pernah bercerita bahwa dia selalu memotong anggaran yang diajukan 30 – 50% dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek setengah dari waktu yang direncanakan oleh birokrat bawahannya. Dan ternyata bisa tuh..! Kondisi keuangan DKI zaman Gubernur Ali Sadikin tahun 1970-an sangat minim tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat banyak dan beragam. Saat ini DKI sangat kaya, tetapi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun sangat minim.

Pada tingkat nasional, prioritas pembangunan transportasi harus lebih mengutamakan jaringan transportasi publik, bukan hanya untuk transportasi pribadi. China saat ini memiliki jaringan rel kereta api total 86.000 km, dan akan bertambah menjadi 110.000 km, termasuk 16.000 km jalur kereta api berkecepatan tinggi. India memiliki jaringan rel kereta api total 63.000 km. Kedua negara tersebut memberikan prioritas utama pada jaringan rel karena kereta api adalah sarana transportasi rakyat dan barang yang paling murah. Indonesia memiliki jaringan kereta api total 6.800 km, dan yang berfungsi hanya 4.600 km. Bayangkan kalau kita membangun jalur kereta api diseluruh pulau-pulau besar Indonesia. Rakyat akan sangat bergembira, ongkos kirim barang pertanian, perkebunan, pertambangan akan sangat murah dan jutaan pekerjaan akan tercipta.

Untuk solusi sementara, bisa mencontoh negara lain, dengan hanya mengizinkan mobil pribadi bernomor ganjil pada hari Senin, nomor genap pada hari Selasa, dst. Memang sekelompok orang kaya akan memiliki mobil bernomor genap dan ganjil. Tetapi jika kebijakan ini diterapkan, paling tidak jumlah kendaraan dijalanan setiap hari akan berkurang sekitar 35%. Sudah tentu, Pemda DKI bersama swasta harus menyediakan lebih banyak busway, bus-bus baru yang nyaman untuk publik. Solusi ini hanya bersifat temporer, sementara Pemda DKI membangun secepatnya jaringan monorail dan subway. Solusi temporer lainnya adalah dengan mengubah awal jam kerja pegawai negeri dan swasta, serta jadwal sekolah anak-anak SD sampai SMA sehingga kepadatan lalu lintas berkurang.

Seorang teman menghitung, curah hujan di Jakarta tanggal 25 Oktober sangat tinggi mencapai 110 mm (110 L/m²), rakyat Jakarta menerima air hujan bersih gratis dari Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 72 juta m³, atau senilai Rp. 500 milyar (asumsi air bersih Rp.7000/m³). Bayangkan rahmat yang sedemikian besarnya justru jadi sumber malapetaka dan langsung terbuang kelaut. Seandainya Pemda DKI mengharuskan setiap tanah dan bangunan seluas 100 m² wajib membangun sumur resapan, maka anugerah Tuhan tersebut justru akan menjadi berkah karena sebagian besar akan masuk menjadi air tanah dan menjadi cadangan air ketika musim kering. Sudah tentu, sungai-sungai dan kali-kali di Jabotabek harus di keruk dan

diperbaiki, dan perlu dibangun jaringan kanal dan bendungan untuk memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin. Perlu dicatat bahwa sebagian besar daerah di Australia menggantungkan sumber airnya dari air hujan yang sangat jarang turun dengan curah hujan yang sangat rendah.

Jakarta, 4 November 2010

[1] Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI